BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Keberagaman merupakan sesuatu hal yang lumrah, suatu keharusan, dan integritas suatu bangsa yang hendaknya diterima sebagai kenyataan positif serta tidak perlu untuk disesalkan, keragaman justru dapat digunakan sebagai kekuatan yang harus dipertahankan untuk kesatuan bangsa (Alam, 2016, hlm. 278). Masyarakat Indonesia patut bangga akan keberagaman yang dimiliki, karena hal ini menjadi salah satu alasan yang menjadikan Indonesia dikenal dunia, selain itu tidak semua Negara memiliki keistimewaan seperti yang dimiliki masyarakat Indonesia. Selama berinteraksi di dalam masyarakat, baik di dunia pendidikan, lingkungan kerja, maupun di lingkungan tempat tinggal, jika kita perhatikan ada banyak keberagaman dan keunikan pada setiap orang yang kita temui. Pada setiap suku bangsa, keberagaman dan keunikan tersebut dapat diidentifikasi melalui bahasa, tradisi, agama, dan lainnya.

Keberagaman suku bangsa di Indonesia tergambar melalui jumlah suku bangsa yang ada. Belum ada kesepakatan mengenai berapa jumlah pasti suku bangsa di Indonesia, antara 300 hingga 1128 suku bangsa bahkan ada pula yang mengatakan lebih dari 1300 suku bangsa ada di Indonesia (Aziz et al., 2019, hlm:1;Brata, 2016, hlm:10;Sari & Harjanti, 2016, hlm:413). Semakin banyak suku bangsa di Indonesia, semakin beragam pula budayanya. Gambaran keberagaman ini dapat kita temui melalui upacara-upacara atau tradisi-tradisi dalam kehidupan sehari-hari mulai dari kelahiran, pernikahan, hingga kematian.

Dalam hal kelahiran misalnya, masyarakat Jawa secara umum ada yang menyebut tradisi tersebut dengan istilah *puputan* dan *selapanan* yang di dalamnya terkandung nilai-nilai penghargaan terhadap Tuhan, manusia serta alam (Aswiyati, 2015, hlm.9) atau di Cirebon terdapat ritual *selamatan kelahiran* yang merupakan wujud rasa syukur kepada Tuhan serta do'a agar dijauhkan dari hal yang tidak diinginkan (Busro & Qodim, 2018, hlm.146). Masyarakat Lombok dalam tradisi perkawinan tidak asing dengan istilah *kawin lari* atau *Merari'* yang menjadi

lambang kejantanan seorang lelaki suku Sasak untuk mendapatkan gadis pujaannya (Saladin, 2014, hlm.20) walaupun hal tersebut dapat mendorong rusaknya identitas sosial perempuan sebagai seorang gadis (Platt, 2012, hlm.76). Tradisi kematian juga ditemukan dan dilaksanakan oleh masyarakat Indonesia, seperti tradisi upacara pemakaman *Saur Matua* pada Masyarakat Batak Toba yang di dalam pelaksanaannya mengandung karakteristik tradisi lisan serta telah dijalankan secara turun-temurun (Matua, 2017, hlm.225). Masyarakat desa Kuta mengenal tradisi *Patuq* yang bertujuan untuk memberikan keselamatan kubur orang yang sudah meninggal dengan memberikan barang-barang miliknya kepada kyai setempat (Rahman, 2019, hlm.344).

Beberapa contoh tradisi yang telah disebutkan merupakan gambaran kemajemukan masyarakat yang ada di Indonesia. Sebuah tradisi yang sama mungkin untuk memiliki penamaan, cara pelaksanaan bahkan makna yang berbeda dengan masyarakat yang lain. Begitu pula tradisi dan kebudayaan memiliki sistem pranata yang berbeda-beda. Tidak ada yang lebih baik atau lebih buruk, karena kebudayaan merupakan buah pikir dan kesepakatan bersama masyarakat untuk mereka jalankan untuk mencapai tujuan hidup kelompok mereka. Adapun nilai dan norma yang kemudian hidup di dalam masyarakat untuk mengatur kehidupan mereka merupakan hasil penyesuaian kebutuhan dan tujuan hidup masing-masing kelompok masyarakat. Koentjaraningrat (2009, hlm. 132.) mengatakan bahwa manusia memiliki suatu sistem yang mengatur tingkah laku sosial mereka di dalam kehidupan bermasyarakat. Adat istiadat, norma, serta sistem yang sifatnya resmi mengatur tingkah laku tersebut, dan seluruh perlengkapannya guna memenuhi berbagai kompleks kebutuhan manusia dalam masyarakat itu disebut sebagai pranata.

Pranata sosial hidup di tengah-tengah masyarakat sesuai dengan kebutuhan hidup masyarakat itu sendiri. Koentjaraningrat (2009, hlm. 135-136) mengelompokkan pranata sosial setidaknya ke dalam delapan kelompok, antara lain (1) pranata yang memenuhi kebutuhan kehidupan kekerabatan (*kinship*); (2) pranata ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia; (3) pranata untuk memenuhi kebutuhan pendidikan; (4) pranata untuk memenuhi kebutuhan ilmiah;

(5) pranata untuk memenuhi kebutuhan rekreasi dan keindahan; (6) pranata untuk memenuhi kebutuhan berhubungan dengan Tuhan (agama); (7) pranata untuk memenuhi kebutuhan mengatur dan mengelola keseimbangan dan kekuasaan kepemimpinan); dan (8) pranata yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan fisik dan kenyamanan hidup.

Masyarakat Kerinci adalah penduduk asli Indonesia yang tinggal di Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Pengetahuan-pengetahuan yang mereka miliki menjadi salah satu faktor pemersatu budaya di dalam masyarakatnya (Helida, Amir, Zuhud, & Hikmat, 2015, hlm. 102). Masyarakat Kerinci memiliki kearifan dan pengetahuan lokal yang telah lama dijalankan. Seperti masyarakat lain yang ada di Indonesia, masyarakat adat Kerinci memiliki pranata sosial yang mengatur kehidupannya di dalam masyarakat yang dapat ditemui dalam berbagai aspek seperti sistem perkawinan, rumah tangga, kekerabatan, kemasyarakatan, pemerintahan, adat, hukum, serta ekonomi.

Masyarakat Kerinci atau masyarakat adat Kerinci merupakan masyarakat adat yang menganut sistem matrilineal, di mana hubungan kekerabatan dibentuk melalui garis keturunan ibu (Dewi, 2017, hlm. 70-71). Hampir seluruh pengorganisasian kehidupannya tidak dapat terlepas dari peranan pemangku adat dengan silsilah matrilineal tersebut. Setiap kepemimpinan adat di desa-desa Kerinci dipimpin dan diawasi oleh pemangku adat sebagai pelaksana dalam pranata kepemimpinan (adat). Menurut Yasin, dkk (1992, hlm. 73-74), pemangku adat Kerinci berkewajiban untuk mempersiapkan masyarakatnya agar tetap menegakkan hukum-hukum adat di kalangan *anak jantan* dan *anak betino*, mengarahkan mereka agar menjunjung tinggi norma-norma adat, serta nilai-nilai agama menurut adat yang telah ditetapkan, yaitu adat yang bersendikan syarak, syarak bersendikan *kitabullah*.

Pemangku adat adalah orang-orang penting dan dihormati di dalam masyarakat yang kehadirannya sangat diharapkan oleh masyarakat yang dipimpinnya. Upacara perkawinan masyarakat adat Kerinci misalnya, sejak proses menjelang lamaran hingga pernikahannya akan selalu melibatkan pemangku adat.

Pemangku adat lah yang mengawasi dan mengarahkan apabila ada hal-hal yang dianggap tidak sesuai atau kurang tepat dalam pelaksanaan proses tersebut.

Pemangku adat adalah orang yang telah mendapatkan gelar pusaka atau *ske* (*ske depati, ske ninik mamak, ske tengganai*) pada *kalbu*/perut/lurah setiap dusun alam Kerinci menurut kesepakatan turun temurun dari nenek moyang melalui upacara pengangkatan menurut adat. Menurut Burhan (2009) pemilihan atau pengangkatan pemangku adat dipimpin oleh Depati beserta Ninik Mamak yang berasal dari utusan kelompok masyarakat untuk mewakili kelompoknya. Musyawarah dan mufakat sangat dikedepankan dalam proses pengangkatan pemangku adat ini (Zarmaili, 2014, hlm. 613). Gelar pusaka atau *ske gelar* adalah gelar adat yang dimiliki setiap kedepatian atau wilayah pimpinan adat. *Ske gelar* masing-masing pemangku adat berbeda-beda pada setiap kedepatian, namun memiliki keterkaitan. *Ske gelar* yang merupakan warisan dari nenek moyang masyarakat adat Kerinci yang masih dapat ditemui dan bertahan karena masih terus diwariskan melalui tradisi pengangkatan pemangku adat.

Adapun dalam pemerintahan adat, Depati merupakan gelar tertinggi yang terdapat di dalam suatu kaum/*kalbu*/perut orang yang memiliki jabatan melalui pengangkatan adat (Yasin, dkk, 1992, hlm. 77). Organisasi pemerintahan adat masyarakat Kerinci dipimpin oleh Depati IV-8 Helai Kain (Depati Empat-Delapan Helai Kain), serta pejabat-pejabat lainnya. Depati IV-8 Helai kain ini di bagi ke dalam beberapa wilayah kekuasaan, antara lain depati IV terdiri dari Depati Atur Bumi yang memimpin di wilayah Hiang, Depati Muaro Langkap di Tamiai, Depati Rencong Telang di Pulau Sangkar, dan Depati Biang Sari di Pengasih. Selain itu, Depati 8 Helai Kain terdiri dari Depati Atur Bumi di Hiang, Depati Sirah Mato di Seleman, Depati Mudo di Penawar, Depati Mudo di Rawang (keempat depati ini dijuluki Depati 3 di Hilir 4 Tanah Rawang), selanjutnya Depati Setu di Kemantan, Depati Kebalo Sembah di Semurup, Depati VII di Sekungkung, dan Depati Niat di Rawang yang keempatnya dijuluki Depati 3 di Mudik 4 Tanah Rawang (Zakaria, 1984, hlm. 44).

Sebagai pihak yang bertanggung jawab mengatur ketertiban di setiap *kalbu*, seorang pemangku adat terlebih dahulu harus memiliki gelar *ske* yang didapatkan

melalui upacara adat. Adapun syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi pemangku adat menurut Zuhud, dkk (2017, hlm. 17) adalah memiliki kemampuan baik material maupun non-materi (pendidikan), berani dan pandai bicara, dan dihormati oleh bangsanya. Hal ini didasari oleh ungkapan pepatah adat Kerinci yang mengatakan bahwa seorang pemimpin haruslah *simbai ekornya, tajinya tajam, dan nyaring kokoknya*. Memperkuat pernyataan tersebut, Zakaria (1984, hlm. 49-50) menambahkan bahwa seorang pemangku adat adalah seseorang yang nyaring kokoknya (perkataannya didengar), sibar ekornya (tahu yang baik dan buruk), kembang sayapnya (adil, bijaksana dalam bertindak dan berbuat), besar paruhnya (tahu adat dan banyak akal), lebar dadanya (berhati lapang, sabar, tidak pemaarah), dan runcing tajinya (tahu hukum dan peraturan, putusannya tidak dapat dibantah). Maka berdasarkan kriteria-kriteria tersebutlah, masyarakat adat Kerinci menyeleksi dan mengangkat pemangku adatnya.

Selain itu pemilihan pemangku adat pada masyarakat adat Kerinci tidak dapat dipisahkan dari sistem matrilineal yang dianut oleh masyarakatnya. Pada sistem matrilineal, keturunan perempuan lebih disukai dalam masalah wewenang keluarga dan properti. Kelompok silsilah sentral dalam keluarga matrilineal terbentuk oleh seorang ibu dan anak-anaknya, baik anak laki-laki atau perempuan, dan kemudian anak-anak perempuan itu sendiri. Ayah bukan anggota rumah tangga, sebaliknya, saudara laki-laki ibu (*mamak*) adalah yang bertanggung jawab sebagai wali dan yang umumnya menjalankan urusan sistem, serta memegang jabatan adat (Sukiati, 2012, hlm. 102-102). Pemegang perananan penting dalam kepemimpinan masyarakat adat Kerinci adalah anak/orang laki-laki dari keturunan ibu. Merekalah yang bertanggung jawab menjalankan dan mengawasi fungsi adat pada tiap keluarga *kalbu*-nya. Hal ini tidak dapat diabaikan karena akan mempengaruhi pewarisan *sko* gelar kepada calon pemangku adat.

Beberapa karakteristik sistem matrilineal berdasarkan J.De.Jong dan Muhammad Radjab antara lain, menurut garis keturunan ibu, suku terbentuk dari suku ibu, pernikahan harus ke luar suku, kekuasaan secara teoritis berada di tangan ibu, adanya kekuasaan saudara laki-laki ibu (*mamak*), suami tinggal di rumah istri, dan warisan diturunkan dari mamak kepada anak saudara perempuan

(Hermayulis, Hernadewita, & Hardian, 2016, hlm. 11). Berdasarkan sistem kekerabatan yang secara turun temurun dianut oleh masyarakat adat Kerinci inilah, selain kriteria-kriteria yang telah dijelaskan sebelumnya, yang bisa menduduki jabatan pemangku adat dalam masyarakat Kerinci adalah orang-orang yang berasal dari keturunan ibu (matrilineal).

Secara umum pengangkatan pemangku adat Kerinci dilaksanakan dengan dengan sebuah upacara pengangkatan pemangku adat yang di dalamnya terdapat kegiatan musyawarah antara para pemangku adat untuk mempertimbangkan dan memilih siapa yang layak untuk diangkat menjadi pemangku adat penerus *ske* untuk menggantikan yang telah meninggal atau diberhentikan karena melakukan tindakan pelanggaran hukum.

Masyarakat adat Kerinci di desa Hiang Tinggi Kecamatan Sitinjau Laut Kabupaten Kerinci mengenal proses pengangkatan pemangku adat dengan istilah *ngangkat tuo teganai umah*. Masyarakat Hiang Tinggi mengikuti sistem kekerabatan matrilineal layaknya masyarakat adat Kerinci secara umum, di mana wewenang dalam keluarga seperti pemangku adat, pembagian harta pusaka dan bidang lain di dalam kehidupan mengutamakan garis keturunan ibu. Kegiatan adat berorientasi pada keluarga matrilineal. Menantu dalam keluarga matrilineal ini disebut sebagai orang luar atau *anak betino* (anak perempuan) sebab ia menikahi anak perempuan dari keluarga tersebut. Setiap laki-laki dalam keluarga matrilineal bertanggung jawab untuk mengurus *anak betino* dalam *kalbu*-nya walaupun ia tidak tinggal di rumah ibu atau keluarga perempuannya, tetapi dalam hal kepemimpinan adat, ia tetaplah menjadi bagian dari keluarga ibu dan saudara perempuannya, serta tidak memiliki tanggung jawab secara adat kepada keluarga isterinya.

Manusia tidak dapat menghindari terjadinya perubahan. Begitu pula masyarakat adat Kerinci. Melalui perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, masyarakat lebih mudah mendapatkan akses ilmu dan informasi sehingga menjadi lebih terbuka dan berwawasan luas. Hal ini pula yang kemudian dapat menumbuhkan kesadaran untuk mengembangkan kualitas dan kemampuan diri agar dapat bertahan dan tidak tertinggal oleh perubahan sosial yang terjadi pada

masyarakat luar. Masyarakat yang memiliki kecenderungan untuk berkembang dan beradaptasi dengan lingkungannya tidak dapat mengelak dari proses ini. Pengangkatan pemangku adat masyarakat adat Kerinci pada dasarnya memiliki pola-pola umum yang sama dan dijalankan sebagai warisan nenek moyang. Namun adanya perubahan atau pergeseran dalam proses ini membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Menurut Hawari ada beberapa aspek dalam kehidupan manusia yang rentan mengalami perubahan, antara lain dalam hal keagamaan, pola hidup, struktur keluarga, hubungan kekeluargaan, nilai-nilai agama dan tradisional masyarakat, lembaga perkawinan serta ambisi karir (Uyun, 2013, hlm. 358). Suparlan kemudian menegaskan bahwa perubahan yang mungkin terjadi dalam kebudayaan dapat disebabkan oleh pengaruh nilai-nilai (kebudayaan) yang datang dari luar. Pengaruh ini berakibat pada perbaikan atau naiknya derajat sosial, ekonomi dan politik dalam masyarakat. Kebudayaan juga cenderung berubah karena isi dan corak dari lingkungan sebuah masyarakat yang juga cenderung berubah (Jacob, 2000, hlm. 2).

Perubahan-perubahan yang ditimbulkan pada berbagai aspek tersebut mampu merubah kiblat masyarakat sehingga hal-hal yang berbau tradisi dan kedaerahan dianggap sesuatu yang ketinggalan zaman, dan mulai ditinggalkan. Sedangkan kebudayaan asing di dipandang lebih baik. Nilai-nilai adat yang mereka anut dan dianggap tidak lagi mendukung eksistensi mereka di dalam masyarakat dapat mereka ganti atau dihapuskan demi dapat bertahan dan beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Sebagai hasil dari pola-pola pemikiran yang sama, kebudayaan yang telah lama dianut mungkin dapat hilang atau bergeser maknanya demi menciptakan kehidupan yang nyaman dan lebih baik.

Masyarakat adat Kerinci di desa Hiang Tinggi melaksanakan pengangkatan pemangku adat layaknya masyarakat adat Kerinci secara umum. Masyarakat ini mengenal proses pengangkatan pemangku adat tersebut dengan istilah *ngangkat tuo teganai umah*. Namun saat ini ada yang mulai tampak berbeda pada proses *ngangkat tuo teganai umah* yang dilaksanakan oleh masyarakat adat Kerinci di Desa Hiang Tinggi.

Pengangkatan pemangku adat Kerinci idealnya dilakukan pada setiap *kalbu/perut* (*kalbu* terdiri dari moyang, kakek dan nenek, orang tua dan anak-anak; dan *perut* terdiri dari *piut*, moyang, kakek dan nenek, orang tua dan anak-anak) garis keturunan matrilineal. Orang yang dapat dicalonkan sebagai pemangku adat adalah *anak jantan* (anak lakil-laki) dari garis keturunan ibu. Namun pada masyarakat Kerinci di Desa Hiang Tinggi, hal inilah yang mengalami perubahan. Pengangkatan pemangku adat yang mulanya dipilih berasal dari *anak jantan* dalam suatu *kalbu/perut* dengan cara musyawarah, saat ini memberikan kesempatan kepada menantu dari keluarga tersebut yang merupakan orang luar dalam garis keturunan matrilineal dipilih menjadi pemangku adat.

Hadirnya *orang luar* dalam kepemimpinan adat keluarga matrilineal di desa Hiang Tinggi tersebut menunjukkan mulai adanya ketidaksesuaian dalam pelaksanaan tata cara dan tradisi adat Kerinci yakni dalam pengangkatan pemangku adat selama ini. *Ngangkat tuo teganai umah* yang dilakukan oleh masyarakat ini menggeser kebudayaan Kerinci yang sudah lama dijalankan oleh masyarakatnya secara turun-menurun. Pepatah Kerinci mengatakan *Adaik nan ndak lejang dek panas, dak lapuk dek hujan, titian teras batanggo batu, jalan barambah nan diturut, baju bajait nan dipakai* (maksudnya: adat tidak lekang oleh panas, tidak akan lapuk oleh hujan) (Zuhud, Helida, & Iswandono, 2017, hlm. 22), masyarakat adat Kerinci hendaknya mempertahankan tradisi tersebut sebaiknya agar tidak terjadi kekacauan di dalam kehidupan masyarakat di masa yang akan datang.

Pengangkatan pemangku adat Kerinci yang lazimnya berdasarkan garis keturunan ibu sesuai dengan sistem kekerabatan matrilineal yang diikuti masyarakat Kerinci, saat ini mulai bergeser dengan dipilihnya menantu yang merupakan *orang luar* dalam garis keturunan matrilineal untuk menjadi pemangku adat. Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Perubahan Sistem Pranata dalam Tradisi Ngangkat Tuo teganai Umah Masyarakat Adat Kerinci (Studi Kasus di Desa Hiang Tinggi Kecamatan Sitinjau Laut Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi)**.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Pretty Eristia Arinda, 2021

PERUBAHAN SISTEM PRANATA DALAM TRADISI NGANGKAT TUO TEGANAI UMAH MASYARAKAT ADAT KERINCI

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Masalah pokok dalam penelitian ini adalah “bagaimana perubahan sistem pranata dalam *tradisi ngangkat tuo teganai umah* masyarakat adat Kerinci (studi kasus di Desa Hiang Tinggi Kecamatan Sitinjau Laut Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi)?”

Untuk mendapatkan gambaran secara mendalam mengenai hal tersebut, peneliti merumuskannya ke dalam pertanyaan-pertanyaan penelitian seperti berikut ini:

1. Bagaimana gambaran pelaksanaan tradisi *ngangkat tuo teganai umah* masyarakat adat Kerinci di Desa Hiang tinggi?
2. Bagaimana perubahan sistem pranata dalam tradisi *ngangkat tuo teganai umah* masyarakat adat Kerinci di desa Hiang Tinggi?
3. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi perubahan pranata dalam tradisi *ngangkat tuo teganai umah* pada masyarakat adat Kerinci di desa Hiang Tinggi?
4. Bagaimana dampak perubahan pranata dalam tradisi *ngangkat tuo teganai umah* terhadap sistem kekerabatan masyarakat adat Kerinci?

1.3 Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian mengenai perubahan sistem pranata dalam *tradisi ngangkat tuo teganai umah* masyarakat adat Kerinci (studi kasus di Desa Hiang Tinggi Kecamatan Sitinjau Laut Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi).

Lebih spesifik tujuan penelitian ini tertuang dalam poin-poin berikut:

1. Mendeskripsikan pelaksanaan tradisi *ngangkat tuo teganai umah* masyarakat adat Kerinci di Desa Hiang Tinggi.
2. Mengidentifikasi perubahan sistem pranata yang terjadi dalam tradisi *ngangkat tuo teganai umah* masyarakat adat Kerinci di desa Hiang Tinggi.
3. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan pranata dalam tradisi *ngangkat tuo teganai umah* masyarakat adat Kerinci di desa Hiang Tinggi.

4. Menganalisis dampak perubahan pranata dalam tradisi *ngangkat tuo teganai umah* terhadap sistem kekerabatan masyarakat adat Kerinci.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang akan diperoleh, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis, praktis, maupun dari segi kebijakan. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memperluas pengetahuan serta menambah bahan kajian mengenai masyarakat adat, kepemimpinan, serta sistem kekerabatan pada masyarakat Kerinci khususnya di Desa Hiang Tinggi, Kecamatan Sitinjau Laut, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi.

Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran masyarakat secara umum, khususnya masyarakat Kerinci untuk lebih memperhatikan kebudayaan dan nilai-nilai adat yang dimiliki dengan mempelajari dan melestarikannya sehingga dapat terus bertahan dari waktu ke waktu. Selain itu tetap mengawasi agar segala bentuk perubahan yang dilakukan sebagai adaptasi budaya sendiri dengan kompleksitas kebutuhan di era milenial seperti saat ini tidak merubah nilai-nilai sosial dan budaya yang telah lama dianut oleh masyarakat.

Secara kebijakan, penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada pemerintah daerah kabupaten Kerinci untuk lebih memperhatikan nilai-nilai sosial dan budaya Kerinci. Pemerintah dapat memberikan kebijakan agar setiap sekolah mengajarkan pelajaran budaya Kerinci pada muatan lokal, memasukkan nilai-nilai budaya Kerinci dalam setiap mata pelajaran yang memiliki korelasi, atau menciptakan lembaga pendidikan yang khusus mempelajari kebudayaan Kerinci, harapannya agar kebudayaan tersebut dapat disosialisasikan dan terinternalisasi dengan baik serta tidak hilang tergerus masa.

1.5 Struktur Organisasi Tesis

Penelitian ini disajikan dengan berpedoman pada kerangka penulisan karya ilmiah. Agar penelitian yang disusun ini menjadi lebih mudah dimengerti, maka disajikan ke dalam lima bab yang disusun berdasarkan struktur penulisan sebagai berikut

Bab I merupakan pendahuluan, bab ini akan menguraikan tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian yang berupa pertanyaan-pertanyaan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian yang dilakukan, serta struktur organisasi tesis. Peneliti juga akan memaparkan alasan dalam pemilihan judul perubahan pranata dalam tradisi *ngangkat tuo teganai umah* masyarakat adat Kerinci (studi kasus di Desa Hiang Tinggi, Kecamatan Sitinjau Laut, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi). Selain itu pada bab ini peneliti menampilkan rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta struktur organisasi tesis.

Bab II merupakan kajian pustaka, pada bab ini disajikan konsep-konsep, teori, dan data yang terkait dengan kajian yang peneliti angkat. Selain itu pada bab ini juga disajikan beberapa penelitian yang telah dilakukan terlebih dahulu terkait penelitian yang peneliti lakukan sebagai pembanding dan acuan dalam penelitian.

Bab III merupakan metode penelitian. Bab ini menguraikan proses, prinsip, serta prosedur guna mengkaji masalah penelitian. Pada bab ini penulis mengungkapkan alasan dalam menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, dan berbagai langkah praktis yang akan dilakukan oleh peneliti di lapangan sebagaimana diungkapkan dalam alur pengumpulan data penelitian.

Bab IV merupakan inti dari penelitian yang dilaksanakan. Bab ini memuat hasil penelitian dan pembahasan yang dijabarkan berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan mengenai Perubahan Sistem Pranata dalam *Tradisi Ngangkat Tuo teganai Umah* Masyarakat Adat Kerinci (Studi Kasus di Desa Hiang Tinggi Kecamatan Sitinjau Laut Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi).

Selanjutnya pada Bab V sebagai bab penutup berisi simpulan, implikasi, serta rekomendasi atas hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan.